

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan sosial ekonomi yang dialami oleh setiap daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat jangka panjang sehingga sulit untuk diatasi hingga saat ini.

Terdapat tiga ciri umum dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, sebagian besar rumah tangga berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang rentan terhadap kemiskinan meskipun mereka tidak tergolong miskin. Kedua, pendapatan menjadi dasar dari ukuran kemiskinan, sehingga tidak memperhitungkan garis kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang digolongkan sebagai penduduk miskin karena kurangnya akses ke layanan dasar serta indikator-indikator pembangunan manusia yang rendah. Ketiga, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dan beragam, perbedaan antar wilayah merupakan ciri dasar dari kemiskinan di Indonesia (Kasriyati, 2018).

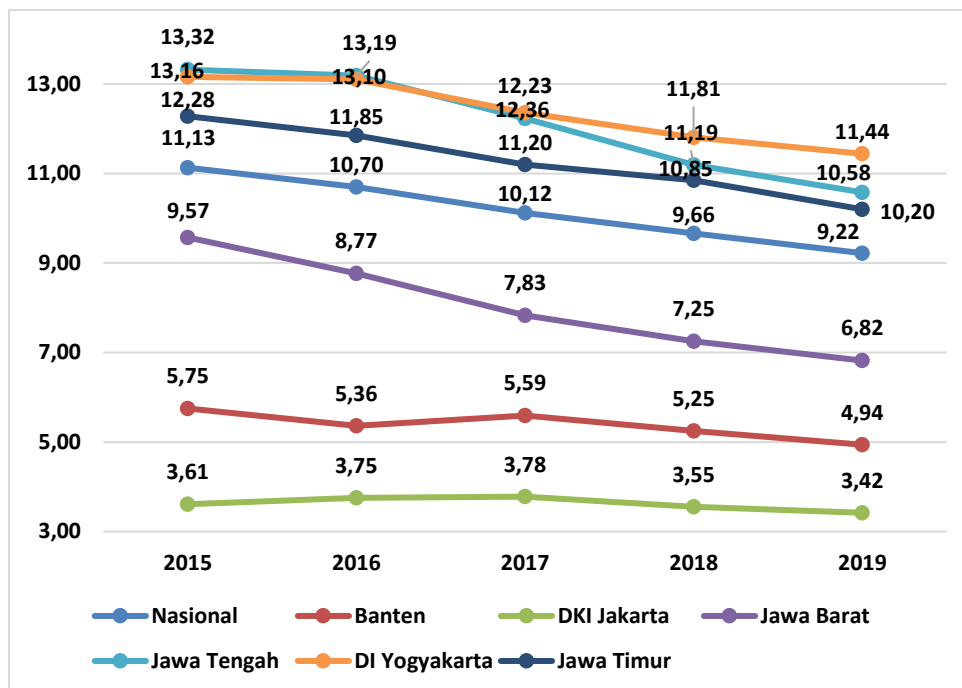
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi di sebagian besar negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan muncul karena adanya sebagian orang yang tidak mampu untuk mengatur kehidupannya sampai taraf yang manusiawi (Purnama, 2017). Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh menjadi lebih rendah.

Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya kemiskinan, yaitu: rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak terkontrol, masih rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya pengetahuan dalam mengembangkan sektor-sektor perekonomian, tingkat

pengangguran yang semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi terus menurun, dan masih banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap munculnya kemiskinan.

Beberapa akibat dari tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu daerah, yaitu: meningkatnya kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, gangguan kesehatan yang akan berdampak pada tingginya angka kematian, gejolak sosial, politik dan lain sebagainya. Dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya dalam meningkatkan pembangunan di berbagai wilayah secara merata demi mencapai kesejahteraan umum, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, keterampilan masyarakat, dan sebagainya. Namun, upaya tersebut masih belum efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara baik.

Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia yang memiliki Luas wilayah mencapai 47.992 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota serta jumlah penduduk yang mencapai 39 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020). Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi terluas di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia tentu saja memiliki berbagai permasalahan sosial yang dihadapi seperti daerah lainnya, salah satunya kemiskinan. Dalam setiap tahunnya, kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang perlu mendapat penanganan yang cukup serius. Kondisi kemiskinan di Indonesia dan Provinsi di Pulau Jawa terlihat pada gambar dibawah ini (Badan Pusat Statistik, 2020).



**Gambar 1.1 Grafik Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Enam Provinsi di Pulau Jawa**

Sumber: BPS 2020 (data diolah)

Berdasarkan pada gambar diatas, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi kemiskinan, antara lain: meningkatkan kesejahteraan penduduknya melalui perbaikan kinerja perekonomian, terciptanya pembangunan yang merata, dan meningkatkan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan (Kominfo Jatim, 2019).

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mengalami tren menurun, akan tetapi permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi permasalahan serius mengingat bahwa tingkat

kemiskinan Jawa Timur masih tinggi, yaitu diatas 10 persen dan berada di posisi tertinggi ketiga diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan provinsi Jawa Timur masih berada diatas tingkat kemiskinan nasional. Hasil usaha pemerintah yang belum merata dalam mengatasi masalah kemiskinan menjadi penyebab masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Padahal dapat diketahui bahwa dampak dari kemiskinan sangat buruk bagi perekonomian suatu daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur.

Dari permasalahan yang dijelaskan di atas, kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang masih tinggi dibanding dengan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa, serta masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur seperti kependudukan dan kualitas hidup manusia yang tercermin pada variabel bebas penelitian ini, yaitu: jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan yaitu besarnya jumlah penduduk. Berdasarkan pada teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan merupakan faktor yang diperlukan untuk mendukung permintaan tambahan. Akan tetapi disisi lain, penambahan jumlah penduduk yang tinggi dikawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap masalah kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan munculnya masalah keterbelakangan dan menyebabkan semakin jauhnya peluang pembangunan. Tanpa

diikuti dengan kemajuan faktor pembangunan lainnya, pertumbuhan penduduk tentu tidak dapat meningkatkan permintaan dan pendapatan (Todaro, 2000:236).

Menurut (Sukirno, 1997:68) Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat pengangguran. Sebagai faktor pendorong, perkembangan jumlah penduduk dengan diiringi pendidikan yang tinggi serta adanya kemampuan dan keahlian dapat meningkatkan produktivitas masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya serta terbebas dari garis kemiskinan. Sementara itu, penduduk disebut sebagai faktor penghambat apabila penduduk memiliki pendidikan yang rendah, kualitas SDM yang rendah, sehingga membuat mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni. Hal ini membuat produktivitas mereka semakin menurun dan akan terdapat banyak pengangguran.

Penjelasan diatas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Thomas Robert Malthus. Malthus berpendapat bahwa jumlah penduduk cenderung tumbuh lebih cepat daripada ketersediaan bahan pangan. Malthus percaya bahwa suatu saat nanti sumber daya akan habis perkembangan jumlah penduduk tidak dibatasi (Malthus, 1978). Pendapat yang sama juga diutarakan oleh pakar ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan Benjamin Franklin dalam (Skusen, 2005). Dari tesisnya dapat disimpulkan bahwa penduduk tumbuh bagaikan deret ukur sedangkan persediaan bahan makanan tumbuh bagaikan deret hitung. Hal ini mengakibatkan, sumberdaya di bumi tidak dapat menyeimbangkan kebutuhan manusia yang secara terus menerus akan selalu meningkat. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dan kesengsaraan.

Selanjutnya, permasalahan kemiskinan yang masih berkaitan dengan jumlah penduduk tinggi adalah ketersediaan lapangan kerja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang diciptakan, sehingga menciptakan pengangguran yang mengarah pada terbentuknya kemiskinan. Pengertian pengangguran menurut (Sukirno, 2004: 28) adalah seseorang yang tergolong sebagai angkatan kerja yang sedang aktif mencari kerja pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi masih belum memperoleh pekerjaan tersebut.

Menurut (Mankiw, 2006: 154), pengangguran adalah masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada manusia dan menjadi masalah yang sangat serius. Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor penentu kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat akan maksimum jika keadaan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat tercipta. Namun jika penggunaan tenaga kerja penuh tidak tercipta, maka akan mengakibatkan munculnya pengangguran. Dampak negatif dari pengangguran yaitu menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga dapat memberikan efek domino yang akan menurunkan tingkat kemakmuran. Semakin rendah tingkat kemakmuran masyarakat akibat pengangguran, semakin besar kemungkinan terjatuh dalam lingkaran kemiskinan dan bisa menyebabkan timbulnya masalah lain, seperti: konflik politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

Selain jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, kualitas hidup manusia diduga mampu menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kualitas hidup manusia dicerminkan melalui indeks pembangunan manusia (IPM). IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yang mengukur kualitas hidup manusia, seperti: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik,

2020). IPM merupakan salah satu tolok ukur pembangunan suatu daerah yang berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi angka IPM menandakan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik (Alhudhori, 2017). Angka tersebut menggambarkan adanya peningkatan kesehatan, tingkat pendidikan yang tinggi, dan tingkat hidup yang layak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmaraga, 2011) IPM berperan penting terhadap penurunan angka kemiskinan. Dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, maka kreatifitas dan produktifitas kerja penduduk juga akan semakin lebih baik. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan berjuang untuk mewujudkan pembangunan nasional. Sebaliknya, IPM yang rendah akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja masyarakat. Ketika produktivitas kerja rendah, maka perolehan pendapatan juga menjadi rendah. Dengan demikian, pendapatan yang rendah menyebabkan jumlah penduduk miskin menjadi semakin banyak (Aldino, 2018).

Dibawah ini dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Dalam Jiwa)	TPT (Dalam Persen)	IPM (Dalam Angka)
2015	38847561	4,47	68,95
2016	39075152	4,21	69,74
2017	39292971	4,00	70,27
2018	39500851	3,99	70,77
2019	39698631	3,92	71,50

Sumber : BPS Jatim 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk Jawa Timur dalam setiap tahunnya dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti kemiskinan, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendaknya melakukan strategi dalam menekan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang diduga dapat mempengaruhi tingginya angka kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur juga mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir. Penurunan angka pengangguran tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup berhasil dalam menekan angka pengangguran di daerahnya.

Selain jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, faktor lainnya yang perlu disorot adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya berbanding lurus dengan tujuan pembangunan yang telah terencana.



Kondisi diatas juga sejalan dengan salah satu tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan angka IPM tetap positif, sebagai bentuk tercapainya target pembangunan (Zakaria, 2018).

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Penelitian ini mencakup series data selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2019 pada Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia sebagai variabel independen.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yang berupa manfaat akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang bisa diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1) Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam memahami pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, dijelaskan secara empiris mengenai faktor-

faktor dan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan selanjutnya bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun strategi atau kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan.

## **2) Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pemahaman peneliti mengenai kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa lain sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Sebagai implementasi dari ilmu dan teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.